



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jaksa Agung Suprpto, Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kode Pos 71513,
Email : inspektorat@tabalongkab.go.id Website : www.inspektorat.tabalongkab.go.id

BERITA ACARA TINDAK LANJUT HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama : Diyanto, SE, MT
NIP : 19711013 200501 1 005
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong
2. Nama : N. Wirahadikusuma, S. IP, MA
NIP : 19880526 200701 1 001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Camat

Telah melakukan Tindak Lanjut Hasil Reviu Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 pada Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong sesuai Catatan Hasil Reviu, dengan hasil sebagai berikut:

No	Catatan Hasil Reviu	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Tidak memuat Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No,3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Tabalong No 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten tabalong Tahun 2026.	Telah diperbaiki dengan memuat peraturan daerah dan Peraturan Bupati tersebut kedalam Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (renja) tahun 2026.	Sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan terdapat pada halaman 5
2.	Belum sepenuhnya menyajikan narasi yang menjelaskan Tabel 2.; tabel 2.1 (tabel T.C.29) Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaianperangkat daerah s/d tahun 2025 kabupaten Tabalong	Telah diperbaiki dengan membuat tabel TC.29 sesuai dengan permendagri	Sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan terdapat pada halaman 9

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
3.	Tidak memuat tabel 2.2 (T.C 30)	Telah diperbaiki dengan memuat tabel 2.2 (T.C.30)	Sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan terdapat pada halaman 15
4.	Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD beisikan uraian mengenai : 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD 2. Khusus provinsi uraian mengenai koordinasi dan sinergi program antara PD Provinsi dengan PD kab/kota serta dengan kementerian dan lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan 3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD 4. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK SPM dan SDGs (sustainable Development Goals) 5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD serta 6. Formulasi isi-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan	Telah di tindaklanjuti dengan mengisi sesuai dengan rekomendasi, akan tetapi ada beberapa rekomendasi yang tidak terdapat pada kecamatan yaitu : 1. Khusus provinsi uraian mengenai koordinasi dan sinergi program antara PD Provinsi dengan PD kab/kota serta dengan kementerian dan lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan 2. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK SPM dan SDGs (sustainable Development Goals)	Sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan terdapat pada halaman 16 sd 18
5.	Tidak memuat tabel 2.3 (T.C.31) review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 kab tabalong kolom 12 seharusnya menyajikan narasi jika terjadi perubahan ranwal	Telah diperbaiki dengan menyajikan narasi akibat terjadinya perubahan ranwal dan ranhir	Sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan terdapat pada halaman 19

No	Catatan Hasil Reviu	Tindak Lanjut	Keterangan
6.	Tidak memuat tabel T.C 32 usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan	Kecamatan tidak menjadi pemangku kepentingan sehingga Kecamatan tidak ada program dan kegiatan seperti tabel T.C 32. Akan tetapi Kecamatan membuat tabel untuk merekap jumlah usulan-usulan desa dan kelurahan dalam musrenbang di Kecamatan	Sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan terdapat pada halaman 24
7.	Kinerja kegiatan/sub kegiatan mendukung kinerja program renja PD dan Renstra PD	Telah diperbaiki dengan menyamakan antara target kinerja renja dan target kinerja renstra pada tabel 2.3	Sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan pada halaman 19

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



N. Wirahadikusuma, S. IP, MA
Pembina (Iva)
NIP.19880526 200701 1 001

Tanjung, 29 Oktober 2025

Plt. Inspektur Daerah,

Diyanto, SE, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711013 200501 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG KECAMATAN TANJUNG

Jln. A. Yani Km. 2,5 No. 33 Kel. Jangkung, Tanjung Tabalong Kode Pos 71512
Laman : <http://www.tabalongkab.go.id> – Pos-el : tanjung@tabalongkab.go.id

TINDAK LANJUT HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : N. WIRAHADIKUSUMA, S. IP, MA
NIP : 19880526 200701 1 001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Camat

Telah melakukan Tindak Lanjut Hasil Reviu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 pada Kecamatan Tanjung Daerah Kabupaten Tabalong sesuai Catatan Hasil Reviu Renja Perangkat Daerah, dengan hasil sebagai berikut:

No	Catatan Hasil Reviu	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Tidak memuat Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No,3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Tabalong No 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten tabalong Tahun 2026.	Telah diperbaiki dengan memuat peraturan daerah dan Peraturan Bupati tersebut kedalam Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (renja) tahun 2026.	Sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan terdapat pada halaman 5
2.	Belum sepenuhnya menyajikan narasi yang menjelaskan Tabel 2.; tabel 2.1 (tabel T.C.29) Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaianperangkat daerah s/d tahun 2025 kabupaten Tabalong	Telah diperbaiki dengan membuat tabel TC.29 sesuai dengan permendagri	Sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan terdapat pada halaman 9

No	Catatan Hasil Reviu	Tindak Lanjut	Keterangan
3.	Tidak memuat tabel 2.2 (T.C 30)	Telah diperbaiki dengan memuat tabel 2.2 (T.C.30)	Sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan terdapat pada halaman 15
4.	Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD beisikan uraian mengenai : 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD 2. Khusus provinsi uraian mengenai koordinasi dan sinergi program antara PD Provinsi dengan PD kab/kota serta dengan kementerian dan lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan 3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD 4. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK SPM dan SDGs (suistanable Development Goals) 5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD serta 6. Formulasi isi-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan	Telah di tindaklanjuti dengan mengisi sesuai dengan rekomendasi, akan tetapi ada beberapa rekomendasi yang tidak terdapat pada kecamatan yaitu : 1. Khusus provinsi uraian mengenai koordinasi dan sinergi program antara PD Provinsi dengan PD kab/kota serta dengan kementerian dan lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan 2. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK SPM dan SDGs (suistanable Development Goals)	Sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan terdapat pada halaman 16 sd 18
5.	Tidak memuat tabel 2.3 (T.C.31) review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 kab tabalong kolom 12 seharusnya menyajikan narasi jika terjadi perubahan ranwal	Telah diperbaiki dengan menyajikan narasi akibat terjadinya perubahan ranwal dan ranhir	Sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan terdapat pada halaman 19

No	Catatan Hasil Reviu	Tindak Lanjut	Keterangan
6.	Tidak memuat tabel T.C 32 usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan	Kecamatan tidak menjadi pemangku kepentingan sehingga Kecamatan tidak ada program dan kegiatan seperti tabel T.C 32. Akan tetapi Kecamatan membuat tabel untuk merekap jumlah usulan-usulan desa dan kelurahan dalam musrenbang di Kecamatan	Sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan terdapat pada halaman 24
7.	Kineja kegiatan/subkegiatan mendukung kinerja program renja PD dan Renstra PD	Telah diperbaiki dengan menyamakan target kinerja renja dan target kinerja renstra pada tabel 2.3	Sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan pada halaman 19

Demikian tindak lanjut ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 29 Oktober 2025

Camat,



N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP, MA

NIP. 19880526 200701 1 001

**CATATAN HASIL REVIU ATAS RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA KECAMATAN TANJUNG
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2026**

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG	Disusun oleh/Tanggal	Siti Muliani, S.T. / 7 Oktober 2025
	Direviu oleh/Tanggal	Heni Lisyanti, A.Ks, MM
	Disetujui oleh/Tanggal	Eka Septya Ningsih, S.STP, MM

Uraian Catatan Hasil Reviu

Sehubungan dengan Surat Tugas Inspektur Daerah Kab. Tabalong Nomor: B-264/INSP/700.1.2/IX/2025 tanggal 24 September 2025 untuk melakukan Reviu Rancangan Akhir (Ranhir) Renja Tahun 2026 pada Perangkat Daerah, maka bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

1. DATA UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan ini Tim APIP melakukan Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) pada Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Tahun 2026.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas kesesuaian dokumen perencanaan dengan kaidah peraturan perundang-undangan sebagai upaya menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas.

2. HASIL REVIU :

2.1. Pengujian atas kesesuaian Rancangan Akhir Renja PD dengan Rancangan Akhir RKPD

2.1.a. Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan Reviu Rancangan Akhir Renja PD

Berdasarkan hasil pengujian atas kelengkapan dokumen reviu Rancangan Akhir RENJA pada Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Tahun 2026, didapat Rancangan Akhir RENJA pada Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Tahun 2026 telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Dokumen	Hard Copy	Soft Copy	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rancangan Akhir RKPD		v	
2	Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD)		v	
3	Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya		v	Tercantum pada BAB II Renja SKPD
4	Renja PD		v	

2.1.b. Rancangan Akhir Renja pada Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Tahun 2026 telah disusun PD

Berdasarkan hasil pengujian atas Rancangan Akhir RENJA pada Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Tahun 2026, didapat Rancangan Akhir pada Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Tahun 2026 telah disusun.

2.1.c. Rumusan sasaran perangkat daerah dalam BAB III rancangan akhir Renja PD telah sesuai dengan sasaran pada BAB IV yang ditetapkan dalam rancangan akhir RKPD

Berdasarkan hasil pengujian atas rumusan sasaran perangkat daerah

dalam BAB III rancangan akhir Renja, didapat rumusan sasaran perangkat daerah dalam BAB III rancangan akhir Renja PD telah sepenuhnya sesuai dengan sasaran pada BAB IV yang ditetapkan dalam rancangan akhir RKPD sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Sasaran/Program/Kegiatan Perangkat Daerah dalam Rancangan Akhir Renja PD	Sasaran/Program/Kegiatan pada Rancangan Akhir RKPD	Catatan Reviu		
			Sesuai	Tidak Sesuai	Rekomendasi
	BAB III Renja PD	BAB IV dan V RKPD			
	SASARAN				
	Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi	Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.	v		
	Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik	Meningkatnya ketahanan pangan daerah.	v		
		Menurunnya tingkat kemiskinan dan terkendalinya ketimpangan	v		
		Menurunnya tingkat pengangguran	v		
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan produktif.	v		
		Berkembangnya sektor unggulan daerah.	v		
		Meningkatnya investasi dan kewirausahaan.	v		
		Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	v		
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa	v		
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.	v		
		Meningkatnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama	v		

		Meningkatnya kemajuan kebudayaan.	v		
		Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan.	v		
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih.	v		
		Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan	v		
	PROGRAM/KEGIATAN				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	v		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	v		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	v		
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	v		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	v		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	v		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	v		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	v		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	v		

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	v		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	v		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	v		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	v		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	v		
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	v		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	v		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	v		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	v		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	v		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	v		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	v		

2.2. Pengujian atas sistematika Rancangan Akhir RENJA Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Tahun 2026.

Berdasarkan hasil pengujian atas sistematika Rancangan Akhir RENJA Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Tahun 2026, didapat sistematika Rancangan Akhir RENJA Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Tahun 2026 belum sepenuhnya sesuai ketentuan sebagaimana tabel di bawah ini:

	Sistematika Sesuai PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017	Sistematika Rancangan Akhir RENJA 2026		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
BAB I	PENDAHULUAN	BAB I	PENDAHULUAN	v		
1.1	Latar Belakang	1.1	Latar Belakang	v		
1.2	Landasan Hukum	1.2	Landasan Hukum		v	Tidak memuat Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 3 Tahun 2025 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Tabalong No. 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026
1.3	Maksud dan Tujuan	1.3	Maksud dan Tujuan	v		
1.4	Sistematika Penulisan	1.4	Sistematika Penulisan	v		
BAB II	Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu	BAB II	Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu	v		
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah		v	- Belum sepenuhnya menyajikan narasi yang menjelaskan Tabel 2.1; - Tabel 2.1 (Tabel T-C 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kab Tabalong
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		v	Tidak memuat Tabel 2.3 (Tabel T-C 30)

2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	v		Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berisikan uraian mengenai : 1. sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; 2. khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan; 3. permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 4. dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals); 5. tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan 6. formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD		v	Tabel 2.3 (T-C 31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kab. Tabalong, Kolom 12 seharusnya menyajikan narasi jika terjadi perubahan Ranwal
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat		v	Tidak memuat Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	v		
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	v		
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	v		
3.3	Program dan Kegiatan	3.3	Program dan Kegiatan		v	Tidak Memuat Tabel T-C.33 Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	v		
BAB V	PENUTUP	BAB V	PENUTUP	v		

2.3. Pengujian atas penyusunan substansi antar BAB pada rancangan akhir Renja PD

2.3.a. Tujuan dan sasaran Renja, program dan kegiatan pada BAB III Renja PD didasarkan dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada BAB II

Berdasarkan hasil pengujian atas tujuan dan sasaran Renja, program dan kegiatan pada BAB III Rancangan Akhir RENJA Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Tahun 2026, didapat tujuan dan sasaran Renja, program dan kegiatan pada BAB III Renja PD didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada BAB II Renja PD. Namun, perlu ditambahkan dampak permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepada daerah dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Catatan Reviu		
			Sesuai	Tidak Sesuai	Rekomendasi
	BAB III Renja	BAB II Renja			
	Tujuan: Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pembangunan di Kecamatan	1. Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tanjung merupakan Ibukota Kabupaten Tabalong yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Tabalong oleh karena itu diharapkan bisa ikut melaksanakan 7 program prioritas terutama yang berkenaan langsung terkait tempat dan wilayah di kecamatan Tanjung seperti satu desa satu wifi, satu desa satu dai, Kecamatan Beshalawat dan Gerakan Masyarakat Jaga Lingkungan (Gema Jalin).	v		Secara garis besar Tujuan, Sasaran dan Program sudah merujuk pada isu-isu penting yang ada pada Kecamatan Tanjung. Namun perlu ditambahkan juga pada bab ini mengenai Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
	Sasaran: Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi				

		2. Bidang Pemerintahan Berlakunya UU Desa yang menuntut aparat kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar desa lebih optimal melaksanakan amanat UU Desa tersebut. 3. Bidang Pelayanan Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima menjadikan kecamatan Tanjung untuk selalu berinovasi agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan.			kegiatan pada tahun yang direncanakan
	Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik				
	PROGRAM				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
	KEGIATAN				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				

2.3.b. Kinerja kegiatan/ sub kegiatan mendukung kinerja program Renja PD dan Renstra PD

Berdasarkan hasil pengujian kinerja kegiatan/ sub kegiatan pada Rancangan Akhir RENJA Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Tahun 2026, didapat kinerja kegiatan/ sub kegiatan pada Rancangan Akhir RENJA Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Tahun 2026 belum sepenuhnya mendukung kinerja program pada Rancangan Akhir RENJA Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Tahun 2026 dan Renstra RENJA Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Tahun 2025-2029 serta Perlu pengkajian ulang target kinerja agar mendukung kinerja program Renja PD dan Renstra PD sebagaimana tabel di bawah ini:

Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja PD	Target Kinerja Progra m/ Kegiata n/ Sub Kegiata n Renja PD	Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Renstra PD	Target Kinerja Progra m/ Kegiata n/ Sub Kegiata n Renstr a PD	Catatan Reviu		
				Menduku ng	Tidak Menduku ng	Rekomend asi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	BB	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100		v	Periksa kembali Target Kinerja yang tertuang pada dokumen Renja dan disesuaikan dengan Dokumen Renstra yang telah diformalkan.
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58 Dokum en	7.01.01.2.01 Perencanaan, Pengang garan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dokume n	v		Periksa kembali Target Kinerja yang tertuang pada dokumen Renja dan disesuaikan dengan Dokumen Renstra yang telah diformalkan.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bln	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19 laporan		v	Periksa kembali Target Kinerja yang tertuang pada dokumen Renja dan disesuaikan dengan Dokumen Renstra yang telah diformalkan.

Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	12 Bln	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14 laporan		v	Periksa kembali Target Kinerja yang tertuang pada dokumen Renja dan disesuaikan dengan Dokumen Renstra yang telah diformalkan.
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bln	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	v		
	12 Bln	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	252 laporan		v	Periksa kembali Target Kinerja yang tertuang pada dokumen Renja dan disesuaikan dengan Dokumen Renstra yang telah diformalkan.
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Paket	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76 unit		v	Periksa kembali Target Kinerja yang tertuang pada dokumen Renja dan disesuaikan dengan Dokumen Renstra yang telah diformalkan.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bln	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	v		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bln	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46 unit		v	Periksa kembali Target Kinerja yang tertuang pada

						dokumen Renja dan disesuaikan dengan Dokumen Renstra yang telah diformalkan.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 4 kegiatan	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 4 kegiatan	v		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 laporan		v	Periksa kembali Target Kinerja yang tertuang pada dokumen Renja dan disesuaikan dengan Dokumen Renstra yang telah diformalkan.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	13 laporan		v	Periksa kembali Target Kinerja yang tertuang pada dokumen Renja dan disesuaikan dengan Dokumen Renstra yang telah diformalkan.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11 20	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11 20	v		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20		v	Periksa kembali Target Kinerja yang tertuang pada dokumen Renja dan disesuaikan

						dengan Dokumen Renstra yang telah diformalkan.
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4 20		v	Periksa kembali Target Kinerja yang tertuang pada dokumen Renja dan disesuaikan dengan Dokumen Renstra yang telah diformalkan.
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12 Bln	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	200		v	Periksa kembali Target Kinerja yang tertuang pada dokumen Renja dan disesuaikan dengan Dokumen Renstra yang telah diformalkan.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12 Bln 100	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12 Bln 100	v		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Bln	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40 laporan		v	Periksa kembali Target Kinerja yang tertuang pada dokumen Renja dan disesuaikan dengan Dokumen Renstra yang telah diformalkan.

PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6		v	Periksa kembali Target Kinerja yang tertuang pada dokumen Renja dan disesuaikan dengan Dokumen Renstra yang telah diformalkan.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			v	Lengkapi dan Periksa kembali Target Kinerja yang tertuang pada dokumen Renja dan disesuaikan dengan Dokumen Renstra yang telah diformalkan.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 4 100				v	Lengkapi dan Periksa kembali Target Kinerja yang tertuang pada dokumen Renja dan disesuaikan dengan Dokumen Renstra yang telah diformalkan.
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bln				v	Lengkapi dan Periksa kembali Target Kinerja yang tertuang pada dokumen Renja dan disesuaikan dengan Dokumen

							Renstra yang telah diformalkan.
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

3. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil reuiu, maka direkomendasikan kepada Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Tahun 2026 agar:

1. Menyesuaikan Tabel 2.1.2 (T-C 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (Tahun Berjalan) Kab. Tabalong sebagai berikut:

- 402 -

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun ... (tahun berjalan)
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Perangkat Daerah :

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun n-1	Perhitungan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1		Urutan								
1.01		Urutan Urutan								
1.01.01		Program								
1.01.01.01		Berjalan								
1.01.01.02		Berjalan								
1.01.01.03		Est								
1.01.02										
1.01.02.01		Program								
1.01.02.02		Berjalan								
1.01.02.03		Berjalan								
1.01.02.04		Est								
1.01.03										
1.01.03.01		Program								
1.01.03.02		Berjalan								
1.01.03.03		Berjalan								
1.01.03.04		Est								
1.01.04										
1.01.04.01		Program								
1.01.04.02		Berjalan								
1.01.04.03		Berjalan								
1.01.04.04		Est								

..... 20.....
Kepala Perangkat Daerah *)

2. Menyesuaikan Tabel 2.2.1 (T-C 30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjung sebagai berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Rencana Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

3. Menyesuaikan Tabel 2.3 (T-C 31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kab. Tabalong sebagai berikut:

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota*

Nama Perangkat Daerah:.....

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

4. Mengkaji ulang target kegiatan antara Renja PD dan Renstra PD agar target dapat mendukung kegiatan antara Renja PD dan Renstra PD



N.Wirahadikusuma, S. IP. MA
NIP. 19880526 200701 1 001

Tanjung, 07 Oktober 2025
PENGENDALI TEKNIS,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'E' followed by a loop and a vertical line.

Eka Septya Ningsih, S.STP, MM
NIP. 19791014 199711 2 001



**RENCANA KERJA
KECAMATAN TANJUNG
TAHUN 2026**

**KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun 2026 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun 2025 -2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2026, untuk menjalankan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong beserta program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun 2026 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon koreksi, saran dan masukan dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong ini dapat bermanfaat dan diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjung, 1 Oktober 2025
Camat Tanjung,



N. WRAHADIKUSUMA, S. IP. MA
NIP. 19880526 200701 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD	8
2.1 Evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Tanjung Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Tanjung	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjung	13
2.3 Isu-Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tanjung	16
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	26
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Tanjung	26
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	34
4.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	34
4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan	62
BAB V PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Realisasi Keuangan Kecamatan Tanjung Tahun 2024	9
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjung	15
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	19
Tabel 2.4 Daftar Usulan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan Kecamatan Tanjung Tahun 2026	24
Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran Kecamatan Tanjung	27
Tabel 3.2 Tujuan Kecamatan Tanjung	28
Tabel 3.3 Sasaran Kecamatan Tanjung	29
Tabel 3.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tanjung	30
Tabel 4.1 Sasaran, Program dan Sub Kegiatan Kecamatan Tanjung Tahun 2026	35
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Tanjung Tahun 2026	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD, RPJMD Serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka Kantor Kecamatan Tanjung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Renja Kecamatan Tanjung tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif Tahun 2026 dan estimasi dana yang dibutuhkan untuk tahun 2027.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, menjadi dasar hukum bagi Kecamatan Tanjung sebagai salah satu SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang ada dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tabalong. Agar pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab urusan tersebut berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten, perlu dibuat langkah-langkah perencanaan yang terencana dan berkesinambungan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Tanjung menyusun Renja Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tanjung. Renja Kecamatan Tanjung Tahun 2026 disusun dengan

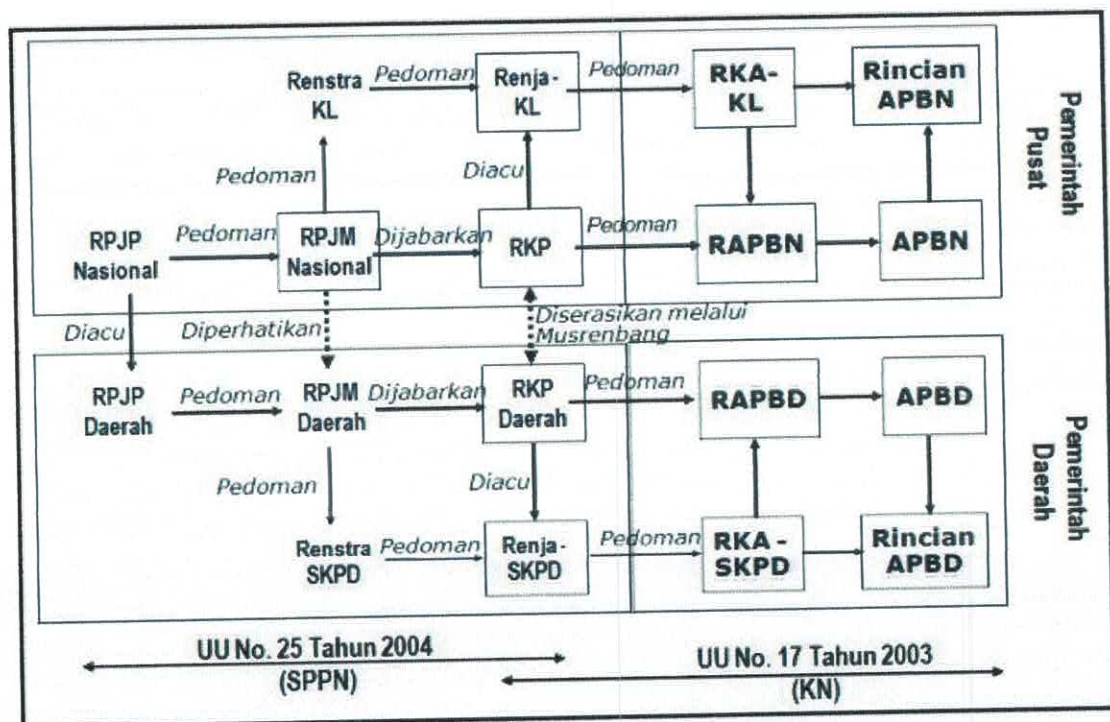
berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Tanjung Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2026.

Dalam pelaksanaannya, berhasil ataupun tidaknya Renja SKPD ini tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat di wilayah Kecamatan Tanjung.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Tanjung Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan,
- Penyusunan rancangan awal,
- Penyusunan rancangan,
- Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- Perumusan rancangan akhir, dan
- Penetapan

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :



1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Tahun 2026 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong

- 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);
 16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
 17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong.
 18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029;
 19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Tanjung adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi dari renstra SKPD 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang sangat strategis di Kecamatan Tanjung.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja Kecamatan Tanjung adalah :

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam perencanaan.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program, kegiatan sub kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh SKPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Berisi uraian tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isuisu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang rencana kerja dan pendanaan yang akan dikelola oleh perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari perencanaan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah tahun 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tanjung Tahun 2024 dan capaian Renstra kecamatan Tanjung

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Tanjung tercermin dalam pelaksanaan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) , diantaranya dapat dilihat dari rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (tahun 2025) sebagai berikut :

Tabel 2.1 (T.C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kecamatan Tanjung

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (renja PD) tahun 2025	Realisasi Target hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Capaian Target Program dan kegiatan tahun 2025 (renja PD tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian: taerget renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan(tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Unsur kewilayahan Kecamatan									
7.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Akip Nilai kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	16.917.727.105	9.545.162.082	12.017.808.961	11.157.589.098	92,84	8.781.500.836	29.484.252.016	174,28
7.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100.202.106	38.052.800	49.626.020	46.673.500	94,05	48.149.170	132.875.470	132,60
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akurat dan tepat waktu	10.717.132.568	6.338.134.065	8.157.261.776	7.676.098.901	94,10	6.379.357.958	20.393.590.924	190,29
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian BMD yang akurat lengkap dan mutakhir	29.425.000	1.806.000	8.100.912	8.000.000	98,75	25.575.000	35.381.000	120,24
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu mutakhir dan terdokumentasi	142.550.000					94.395.000	94.395.000	66,21
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai SOP	1.054.894.782	862.400.925	1.690.313.049	1.494.941.794	88,44	521.027.513	2.878.370.232	272,85
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan BMD yang sesuai dengan yang direncanakan	1.393.917.346					0	0	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/disediakan	1.388.410.000	1.014.741.161	1.067.264.916	980.812.586	91,90	727.014.185	2.722.567.932	196,09

7.01.01.2.09	Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	2.091.195.303	1.290.027.131	1.045.242.288	951.062.317	90,99	985.982.010	3.227.071.458	154,31
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	364.247.470	428.589.130	445.916.859	436.963.108	97,99	0	865.552.238	237,62
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	226.819.880	250.627.130	162.033.479	155.358.108	95,88	0	405.985.238	178,99
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	137.427.590	154.962.000	283.883.380	281.605.000	99,20	0	436.567.000	317,67
7.01.02.2.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pertemuan yang dilimpahkan kepada camat		23.000.000					23.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	5.643.936.073	1.717.569.005	1.700.181.992	1.393.374.936	81,95	3.296.155.112	6.407.099.053	113,52
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	21.699.000	119.648.920				15.950.000	135.598.920	624,90
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	5.515.082.654	1.597.920.085	1.237.170.294	1.035.721.766	83,72	3.222.447.680	5.856.089.531	106,18
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	107.154.419		463.011.698	357.653.170	77,24	57.757.432	415.410.602	387,67

7.01.04	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketertarikan dan ketertarikan umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	93.687.200	51.150.000	91.856.224	87.791.351	95,57	29.167.480	168.108.831	179,43
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Terlaksananya koordinasi sektor dalam upaya ketertarikan dan ketertarikan umum	93.687.200	51.150.000	91.856.224	87.791.351	95,57	29.167.480	168.108.831	179,43
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila wawasan kebangsaan dan bela negara dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI	753.750.939	28.075.000	476.390.636	431.143.035	90,50	460.857.000	920.075.035	122,06
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila wawasan kebangsaan dan bela negara dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI	753.750.939	28.075.000	476.390.636	431.143.035	90,50	460.857.000	920.075.035	122,06
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	109.558.992	62.268.500	90.628.000	75.308.500	83,10	50.808.000	188.385.000	171,94
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	109.558.992	62.268.500	90.628.000	75.308.500	83,10	50.808.000	188.385.000	171,94
JUMLAH			23.882.907.779	11.832.813.717	14.822.782.672	13.582.170.028	91,63	12.618.488.428	38.033.472.173	159,25

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 capaian realisasi keuangan Kantor Kecamatan Tanjung yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan berjumlah sebesar **Rp. 13.582.170.028,-** atau sebesar 91,63 % dari total pagu anggaran yang telah disediakan yakni **Rp. 14.822.782.672,-**.

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan Tanjung mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan Otonomi Daerah. Kewenangan tersebut diantaranya :

1. Pelayanan fasilitasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Pelayanan Fasilitasi penerbitan Kartu Keluarga (KK).
3. Pelayanan penerbitan Keterangan Pindah.
4. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat.
5. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
6. Mengkordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan fakir miskin, komunitas adatterpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
7. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam membangun desa.
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
9. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Tanjung menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjung, diantaranya :

1. Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya.
2. Mengadakan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Meningkatkan sistem pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

Disamping itu, kinerja pelayanan perangkat daerah yang merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjung

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong, maka Kecamatan Tanjung mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Kedudukan Kecamatan

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
2. Kecamatan dipimpin oleh Camat.
3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

b. Tugas Pokok Kecamatan

Kecamatan Tanjung memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

c. Fungsi Kecamatan

Fungsi Kecamatan Tanjung adalah sebagai pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pengkoordinasian pelayanan administrasi publik dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Camat selaku kepala SKPD dibantu oleh Sekretaris Camat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi 4 (empat) Seksi yang terdiri dari : Pemerintahan, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, dan Keamanan dan Ketertiban Umum.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, Kecamatan Tanjung berpangku pada visi Kabupaten Tabalong “ **menuju Tabalong SMART “ (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)** dengan mengemban misi :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat : Memastikan akses merata ke layanan dasar, mendorong ekonomi berkelanjutan, dan mendukung UMKM serta pertanian.
2. Mendorong kemajuan Tabalong : Membangun infrastruktur modern, memanfaatkan teknologi dan meningkatkan keterampilan kerja.
3. Memperkuat nilai-nilai religius dalam kehidupan : memperkuat kerukunan antar

umat beragama dan menerapkan nilai religius dalam kebijakan.

4. Menjadikan Tabalong Daerah yang terdepan : Mengutamakan inovasi pelayanan publik, mamaksimalkan potensi lokal dan berkomitmen pada transparansi serta akuntabilitas.

Mewujudkan Tabalong SmaRT sebagai daerah yang sejahtera dan maju, dengan mengedepankan nilai-nilai religius serta menjadi yang terdepan di berbagai bidang. Dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan, Tabalong siap menjadi daerah yang unggul dan membanggakan.

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dan kelemahan yang dihadapi oleh Kecamatan Tanjung dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, diantaranya :

1. Sarana dan prasarana Pelayanan yang masih belum memadai, contohnya untuk fasilitas pelayanan kepada disabilitas masih belum tersedia di Kantor Kecamatan Tanjung. Akan tetapi sudah dianggarkan pada pagu Perubahan untuk pemeliharaan gedung kantor / rehab / perbaikan dan penambahan parkir untuk kendaraan sehingga kedepan nya untuk pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal.
2. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dan kurangnya pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan kerja dan profesionalitas aparatur Kecamatan Tanjung.
3. Minimnya pemanfaatan teknologi dalam bekerja dikalangan aparatur Kecamatan Tanjung menyebabkan kurang efektif dan efisiennya pemanfaatan waktu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan.
4. Jumlah SDM Aparatur yang masih kurang memadai.

Disamping kendala dan kelemahan yang ada, Kecamatan Tanjung juga memiliki beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Tanjung dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Tabalong, diantaranya :

1. Adanya struktur organisasi yang terpola.
2. Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat.
3. Suasana kerja di Kecamatan Tanjung yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (*team work*).
4. Adanya koordinasi yang baik dengan kelurahan dan desa di Wilayah Kecamatan

Tanjung.

Adapun isu-isu penting lainnya yang ada di Kecamatan Tanjung adalah sebagaiberikut :

1. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Kecamatan Tanjung merupakan Ibukota Kabupaten Tabalong yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Tabalong oleh karena itu diharapkan bisa ikut melaksanakan 7 program prioritas terutama yang berkenaan langsung terkait tempat dan wilayah di kecamatan Tanjung seperti satu desa satu wifi, satu desa satu dai, Kecamatan Beshalawat dan Gerakan Masyarakat Jaga Lingkungan (Gema Jalin).

2. Bidang Pemerintahan

Berlakunya UU Desa yang menuntut aparat kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar desa lebih optimal melaksanakan amanat UU Desa tersebut.

3. Bidang Pelayanan

Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima menjadikan kecamatan Tanjung untuk selalu berinovasi agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Tanjung Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec Tanjung	Nilai AKIP	BB	17.609.313.153	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec Tanjung	Nilai AKIP	BB	17.195.834.564	
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Tanjung	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	58 Dok	99.969.073	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Tanjung	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	58 Dok	99.624.210	Dengan berjalannya proses perencanaan (Asistensi dan rasionalisasi)
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Tanjung	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	12 Bln	11.238.849.920	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Tanjung	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	12 Bln	11.134.289.920	Dengan berjalannya proses perencanaan (Asistensi dan rasionalisasi)
	3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kec Tanjung	Terlaksananya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	12 Bln	19.350.000	3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kec Tanjung	Terlaksananya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	12 Bln	19.350.000	
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec Tanjung	Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bln	111.510.000	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec Tanjung	Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bln	102.550.000	Dengan berjalannya proses perencanaan (Asistensi dan rasionalisasi)
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Tanjung	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	12 Bln	1.170.439.831	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Tanjung	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	12 Bln	1.055.904.831	Dengan berjalannya proses perencanaan (Asistensi dan rasionalisasi)

6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Tanjung	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Tanjung	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Paket	1.381.419.678	Dengan berjalannya proses perencanaan (Asistensi dan rasionalisasi)
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Tanjung	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Tanjung	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bln	1.440.151.870	Dengan berjalannya proses perencanaan (Asistensi dan rasionalisasi)
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Tanjung	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Tanjung	Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bln	1.962.544.055	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec Tanjung	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec Tanjung	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	100 4	701.707.622	
9.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Tanjung	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Tanjung	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	490.681.920	Dengan berjalannya proses perencanaan (Asistensi dan rasionalisasi)
10.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec Tanjung	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec Tanjung	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	211.025.702	Dengan berjalannya proses perencanaan (Asistensi dan rasionalisasi)
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec Tanjung	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec Tanjung	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	11 20	6.427.979.514	

11	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tanjung	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	11	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tanjung	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	31.598.800	100	31.598.800	Dengan berjalannya proses perencanaan (Asistensi dan rasionalisasi)
12	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	6.225.788.880	100	6.225.818.880	Dengan berjalannya proses perencanaan (Asistensi dan rasionalisasi)
13	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Kec. Tanjung	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	13	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Tanjung	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12 Bln	172.761.834	12 Bln	170.561.834	Dengan berjalannya proses perencanaan (Asistensi dan rasionalisasi)
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tanjung	Meningkatnya koordinasi upaya penangan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tanjung	Meningkatnya koordinasi upaya penangan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	12 Bln 100	150.941.400	12 Bln 100	147.941.400	Dengan berjalannya proses perencanaan (Asistensi dan rasionalisasi)
14	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tanjung	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	14	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tanjung	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bln	150.941.400	12 Bln	147.941.400	Dengan berjalannya proses perencanaan (Asistensi dan rasionalisasi)
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Tanjung	Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Tanjung	Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI	2	716.956.200	2	718.706.200	Dengan berjalannya proses perencanaan (Asistensi dan rasionalisasi)
15	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Tanjung	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Tanjung	Terlaksananya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Keg	716.956.200	1 Keg	718.706.200	Dengan berjalannya proses perencanaan (Asistensi dan rasionalisasi)

6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Tanjung	Meningkatnya kualitas tata pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	100 4 100	245.052.600	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Tanjung	Meningkatnya kualitas tata pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	100 4 100	236.052.600	
	16. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Tanjung	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bln	245.052.800	16 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Tanjung	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bln	236.052.800	Dengan berjalannya proses perencanaan (Asistensi dan rasionalisasi)
	Program : 6 Kegiatan : 16				25.327.010.489	Program : 6 Kegiatan : 16				25.428.222.100	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat desa, BPD dan tokoh-tokoh masyarakat yang bermusyawarah dalam musrenbang desa maupun musrenbang kelurahan.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah diatur dalam Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif.

Tahapan musrenbang dapat diskriptifkan fungsi dan perencanaan serta kerangka waktu masing-masing tahapan musrenbang :

1. Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan adalah tahapan penggalan usulan program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini dibuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam rangka berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan (minggu II s/d minggu IV bulan Januari). Musrenbang tingkat ini merupakan tahapan penentuan prioritas usulan program/kegiatan dari masing-masing RT/RW serta pengklasifikasian usulan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Musrenbang tingkat Kecamatan adalah tahapan pemantapan usulan program/kegiatan yang akan disampaikan pada forum SKPD. Pada tahap ini

peranan SKPD sangat besar dalam membantu masyarakat memformulasikan usulan program/kegiatan mereka (minggu I & IV bulan Februari)

3. Forum SKPD adalah tahapan sinkronisasi usulan program/kegiatan SKPD dengan usulan masyarakat hasil usulan Musrenbang Kecamatan. Pada tahap ini usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD sesuai misi dalam RPJMD. Minggu ke IV bulan Februari).
4. Musrenbang tingkat Kabupaten adalah puncak dari pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten ini adalah tahapan finalisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang akan diimplementasikan oleh masing-masing SKPD terkait. (minggu II bulan Maret)

Adapun usulan program dan kegiatan dari masyarakat Kecamatan Tanjung dapat dilihat pada tabel berikut

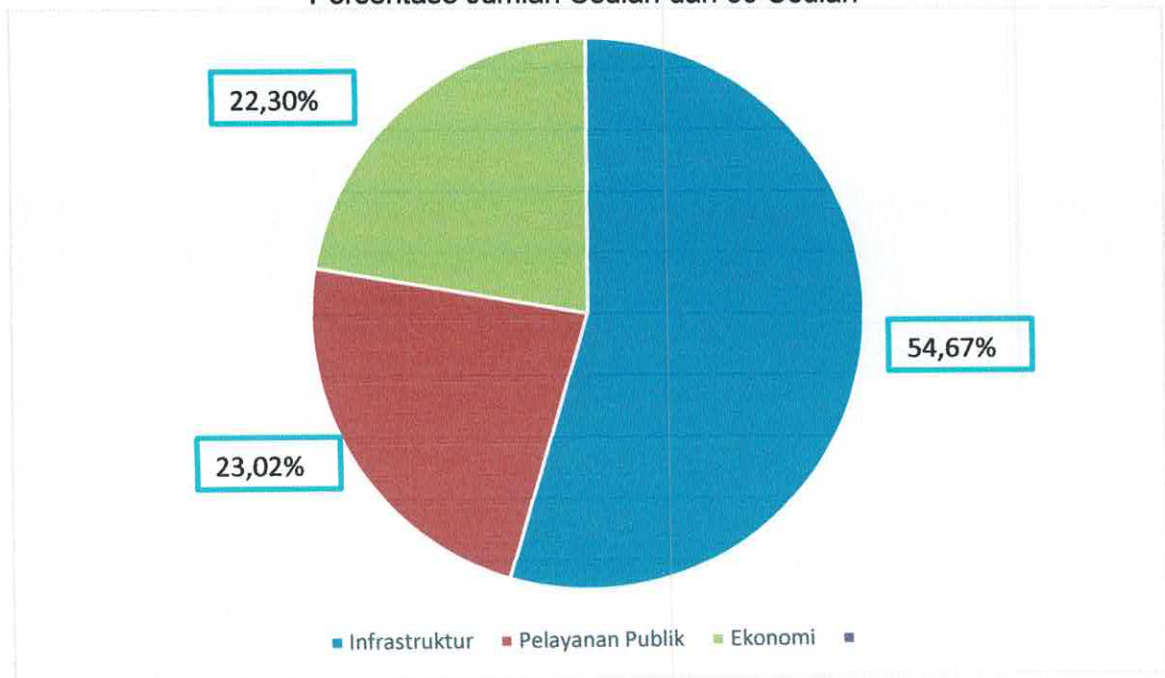
Tabel 2.4
Daftar Usulan Musrenbang Tingkat Desa / Kelurahan
Kecamatan Tanjung Tahun 2026

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Usulan Per kegiatan			Jumlah Usulan
		Infrastruktur	Pelayanan Publik	Ekonomi	
1.	Kelurahan Agung	4	0	1	5
2.	Kelurahan Hikun	4	0	0	4
3.	Kelurahan Jangkung	8	0	0	8
4.	Kelurahan Tanjung	18	5		23
5.	Desa Banyu Tajun	2	3	4	9
6.	Desa Garunggung	4	6	1	11
7.	Desa Juai	4	5	2	11
8.	Desa Kambitin	4	3	2	9
9.	Desa Kambitin Raya	2		3	5
10.	Desa Kitang	4	0	0	4
11.	Desa Mahe Seberang	2	0	1	3
12.	Desa Pamarangan Kiwa	3	0	0	3
13.	Desa Puain Kiwa		3		3
14.	Desa Sei Pimping	2	6	14	22
15.	Desa Wayau	15	1	3	19
Jumlah		76	32	31	139

Jumlah Usulan berdasarkan kelompok se Kecamatan Tanjung

Infrastruktur : 76 Usulan (54,67%)
Pelayanan Publik : 32 Usulan (23,02%)
Ekonomi : 31 Usulan (22,30%)

Gambar 1
Persentase Jumlah Usulan dari 69 Usulan



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung ini mengacu pada RPJPD, RPD 2025-2029, RKPD serta Rencana Strategis Kecamatan Tanjung yang harus disinkronisasikan dengan kebijakan nasional yang memuat 8 (delapan) Program Nasional, meliputi :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Tanjung

Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tabalong adalah Menuju Tabalong SMART (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan). Tujuan dan sasaran Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Kecamatan Tanjung

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran SKPD (outcome)
1.	Mewujudkan Kemandirian Daerah	Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik	Mewujudkan Kemandirian Daerah	Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pembangunan di Kecamatan.

Tabel 3.2
Tujuan Kecamatan Tanjung

No	Tujuan SKPD	Indikator Tujuan SKPD	Target Kinerja SKPD Tahun 2026
1.	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pembangunan di Kecamatan.	Persentase Usulan Masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah	100
		Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD)	100
		Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD)	100

Tabel 3.3
Sasaran Kecamatan Tanjung

No	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran SKPD	Target Sasaran SKPD Tahun 2026
1.	Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi	Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%)	100
		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)	100
		Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tanjung

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TANJUNG									
5.	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
6.	Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target	%	100	100	100	100	100	100	100	

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rancangan program dan kegiatan Kecamatan Tanjung tahun 2026 dituangkan dalam renja Kecamatan Tanjung tahun 2026. Jumlah seluruh program di tahun 2026 sebanyak 6 (enam) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 16 (enam belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 25.428.222.100,- dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Tabalong.

Program Kecamatan Tanjung Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Tanjung Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal
- 10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di

Wilayah Kecamatan

11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
12. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.
 - b. Sarana dan Prasarana di kelurahan
 - c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - d. Evaluasi Kelurahan
13. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - a. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga
14. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
 - b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
15. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
16. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - c. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TANJUNG

4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong pada tahun 2026 merencanakan 6 (enam) program dan 16 (enam belas) kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD Kabupaten Tabalong senilai Rp. 25.428.222.100,-. Program dan Kegiatan tersebut secara terinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Kecamatan Tanjung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TANJUNG							
- Meningkatnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih - Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pembangunan di Kecamatan				Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD) (%)		
					Persentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)		
					Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA PPAS/APBD) (%)		

			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Kegiatan)	7.01.03 – Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
			Jumlah pelatihan dan pembinaan kelembagaan masyarakat (RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dll) (Kegiatan)	7.01.03 – Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Terlaksananya Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan			

	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan	

		Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
	Meningkatnya koordinasi upaya penangan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan		Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah (Kegiatan)	7.01.04 - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Persentase laporan gangguan ketertiban yang ditindaklanjuti dalam 2 hari (%)	7.01.04 - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	

				Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam upaya ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya fasilitas pembinaan ideologi Pancasila, wawasan		Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam forum kebangsaan dan bela negara (Kegiatan)	7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

kebangsaan dan bela negara dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI			Jumlah Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Kegiatan)	7.01.05 – Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan			Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ekonomi Sosial Budaya (%)	7.01.06 – Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
						Jumlah pertemuan koordinasi rutin antara kecamatan dan desa (Kegiatan)	7.01.06 – Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
						Persentase desa yang mendapat asistensi perencanaan dan pengelolaan APBDes (%)	7.01.06 – Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	

		Desa	
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)		7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)		7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset		7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan	

				Desa (Dokumen)	Pendayagunaan Aset Desa	
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	
	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Perangkat Daerah			Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)		
			Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	7.01.01 - Prpgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	
				Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran,	
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup		

Perangkat Daerah		Perangkat Daerah (Data)	dan Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	-	

RKA-SKPD (Dokumen)	Daerah	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan	

(Dokumen)	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
Jumlah RKA-SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					
Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD					
Jumlah Dokumen DPA-SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD					
Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
	Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

SKPD (Laporan)					
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				

				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
			Terlaksananya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (BMD) secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan.	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan	

		(Dokumen)	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Tertaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi.	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
	Terselenggaranya pelayanan administrasi umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat	

perkantoran yang tertib dan efisien.				Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Daerah	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan sesuai spesifikasi kebutuhan perangkat daerah dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Tersedianya jasa penunjang kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Terpeliharanya kondisi barang milik daerah agar tetap layak pakai dan berfungsi optimal	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	

		Daerah	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan

Program, kegiatan dan sub Kegiatan Kecamatan Tanjung Tahun 2026 yang bersumber dari APBD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tanjung Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Kode rek	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan	Renja Akhir Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Kecamatan Tanjung	BB	17.195.834.564	APBD	BB	BB	18.929.721.500
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan E valuasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	Kecamatan Tanjung	58 Dokumen	99.624.210	APBD	58 Dokumen	58 Dokumen	127.465.986
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tanjung	12 Bln	11.134.289.920	APBD	12 Bln	12 Bln	12.243.734.912
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kecamatan Tanjung	12 Bln	19.350.000	APBD	12 Bln	12 Bln	21.285.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Tanjung	12 Bln	102.550.000	APBD	12 Bln	12 Bln	137.661.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	Kecamatan Tanjung	12 Bln	1.055.904.831	APBD	12 Bln	12 Bln	1.537.433.814
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kecamatan Tanjung	10 Paket	1.381.419.678	APBD	10 Paket	10 Paket	1.251.786.510
7.01.01.2.08	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tanjung	12 Bln	1.440.151.870	APBD	12 Bln	12 Bln	1.620.313.798
7.01.01.2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	Kecamatan Tanjung	12 Bln	1.962.544.055	APBD	12 Bln	12 Bln	1.990.040.480
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Kecamatan Tanjung	100 kegiatan 4 kegiatan	701.707.622	APBD	100 kegiatan 4 kegiatan	100 kegiatan 4 kegiatan	773.230.300
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan anjung	100	490.681.920	APBD	100	100	548.503.313

7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Tanjung	100	211.025.702	APBD	100	100	224.726.987
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Kecamatan Tanjung	11 20	6.427.979.514	APBD	11 20	11 20	6.957.775.700
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Tanjung	100	31.598.000	APBD	100	100	34.578.680
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan	100	6.225.818.880	APBD	100	100	6.732.979.003
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Tanjung	12 Bln	170.561.834	APBD	12 Bln	12 Bln	190.038.017
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	Kecamatan Tanjung	12 Bln 100	147.941.400	APBD	12 Bln 100	12 Bln 100	163.326.100
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tanjung	12 Bln	147.941.400	12 Bln	12 Bln	12 Bln	163.326.100
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI	Kecamatan Tanjung	2	718.706.200	APBD	100	2	775.782.400
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Tanjung	2 Kegiatan	718.706.200	APBD	100%	2 Kegiatan	775.782.400
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	Kecamatan Tanjung	100 4 100	236.052.800	APBD	100	100 4 100	265.159.300
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Tanjung	12 Bln	236.052.800	APBD	12 Bln	12 Bln	265.159.300

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun 2026 ini dengan memperhatikan catatan-catatan, kaidah-kaidah serta rencana tindak lanjut pelaksanaan sebagai berikut :

1. Catatan Penting

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun 2026 disusun berdasarkan RPD 2025 - 2029, RKPD serta dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Renstra Tahun 2025 - 2029, guna tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong.

2. Kaidah Pelaksanaan

- Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun 2026 ini sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan dan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam satu tahun anggaran, digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Tanjung Tahun 2026.
- Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun 2026 ini menjadi acuan kerja dari semua kasi dan kasubbag sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Kecamatan Tanjung.
- Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Tahun 2026 digunakan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung tahun lalu, perkiraan tahun berjalan dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan R-APBD 2027;
- Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung digunakan sebagai alat untuk merumuskan tujuan dan sasaran kegiatan, untuk merencanakan program kegiatan guna mencapai tujuan Kecamatan Tanjung dan untuk menentukan indikator kinerja serta Tingkat pencapaian strategis.

- Dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan, sehingga diperlukan langkah-langkah penyesuaian yang akan terwujud dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Tahun 2026.

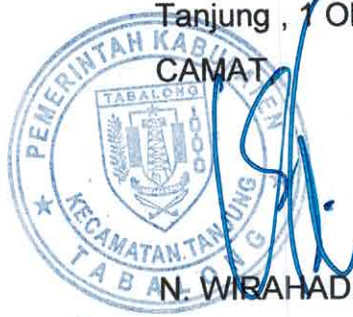
3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaanya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Tahun 2026 akan dilakukan monitoring dan evaluasi, baik itu mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi maupun pagu indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras dan kerja bersama oleh sumber daya manusia Kecamatan Tanjung dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mewujudkan Tabalong SMART.

Tanjung , 1 Oktober 2025

CAMAT



N. WIRAHADIKUSUMA, S. IP. MA

NIP. 19880526 200701 1 001